

# ISLAM LIBERAL PERSPEKTIF LEONARD BINDER DAN CHARLES KURZMAN

Maftuh

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: maftuh10@gmail.com

**Abstract:** This article explains about the imbalance in the religious understanding of Muslims today. This is due to the too narrow mind set of Muslims in interpreting the sources of Islamic teachings. Often Muslims are trapped textually in interpreting the al-Qur'an. So that religious doctrine becomes stagnant. Most humans do not understand that they are given the potential for reason by God. The concept of Islamic Liberalism by Leonard Binder and Charles Kurzman present a perspective on interpreting Islam, where Islam should be interpreted contextually according to the era. The following article will explain briefly about liberal Islamic by focusing on the views or thoughts of Islamic Liberalism according to Leonard Binder and Charles Kurzman.

**Keyword:** Islamic Liberalism, Islamic Thought.

## Pendahuluan

Kajian pemikiran dalam Islam pada hakikatnya adalah upaya untuk membuka kerangka berfikir dalam memperoleh khazanah ilmu pengetahuan baru yang pada titik akhirnya kemudian mendapatkan kearifan, baik secara pemikiran maupun tindakan. Dalam percaturan pemikiran Islam selama ini, pada satu sisi dinilai bahwa hal demikian adalah suatu keharusan, dengan harapan membangkitkan semangat dalam memahami pesan moral Ilahi yang secara aksiologis bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dari kebodohan menuju berpengetahuan dan berperadaban. Namun di sisi lain, justru pemikiran yang tidak terkontrol, akan memiliki dampak negatif terhadap gaya berfikir seseorang, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling klaim kebenaran dan menjatuhkan.

Berkembangnya pemikiran Islam liberal ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam keberagaman merupakan suatu indikasi tentang hidupnya pemikiran dalam Islam. Di satu sisi dinilai

hal tersebut baik untuk perkembangan umat yang taraf berfikirnya sudah terkontrol, namun menjadi tidak baik apabila hal tersebut menghilangkan esensi atau nilai sosial yang berujung pangkal pada saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain.

Bertolak dari pemahaman tersebut, yang menjadi titik tekan sebenarnya adalah bagaimana Islam sebagai agama yang bersifat dinamis, mampu memosisikan Islam sebagai motivasi pemikiran, tindakan serta kontrol terhadap pelbagai fenomena sosial yang menggejala. Walaupun keberadaannya menurut para pemikir Islam adalah statis, dengan anggapan tersebut perlunya adanya paradigma dan gerakan baru untuk membangkitkan Islam dari kungkungan.

Oleh karenanya Islam liberal tampil sebagai upaya memberikan motivasi untuk membangun kerangka paradigmatis yang akan mendinamiskan Islam dalam berbagai segi. Sehingga hadirnya memberikan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran umat.

Di antara literatur yang dianggap sebagai pendahulu yang menggunakan istilah Islam Liberal, terutama yang dikenal di Indonesia, adalah buku-buku tulisan Leonard Binder, *Islamic Liberalism*, dan Charles Kurzman, *Liberal Islam*. Kedua buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masing-masing tahun 2001 (Binder)<sup>1</sup> dan 2003 (Kurzman).<sup>2</sup> Apa yang dimaksud dengan Islam Liberal oleh kedua penulis tersebut dan sejauh mana cakupannya? Tulisan singkat ini akan mengeksplorasi secara kritis penjelasan-penjelasan mengenai persoalan pokok ini dari buku Binder dan Kurzman di atas.

### **Islam Liberal Perspektif Leonard Binder**

Leonard Binder (lahir 20 Agustus 1927) adalah seorang ilmuwan politik Amerika. Dia adalah seorang profesor terkemuka ilmu politik dan mantan direktur Pusat Timur Dekat di University of California, Los Angeles (UCLA). Binder juga Ketua Departemen Ilmu Politik dari UCLA dan University of Chicago. Dia dipilih mahasiswa

---

<sup>1</sup> Terjemahan karya Binder *Ideologies Islamic Liberalism: A Critique of Development* ini dalam bahasa Indonesia diberi judul *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, diterbitkan oleh Putaka Pelajar Yogyakarta tahun 2001. Versi terjemahan ini tidak digunakan oleh penulis untuk makalah ini.

<sup>2</sup> Terjemahan karya Charles Kurzman dkk., *Liberal Islam: The Source Book* diterbitkan pertama kali tahun 2003 oleh penerbit Paramadina Jakarta dengan judul *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Makalah ini menggunakan karya terjemahan ini sebagai rujukan.

Fellow American Academy of Arts dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 2002.<sup>3</sup>

Leonard Binder adalah seorang spesialis yang dikenal secara internasional pada politik Timur Tengah dan pemikiran politik Islam. Jabatan profesor di Departemen ini didukung oleh UCLA Institut Internasional administrasi di UCLA. Dia adalah anggota pendiri dan telah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Studi Timur Tengah Amerika Utara (MESA). Dia telah menjadi anggota dari kedua Politik Perbandingan dan Studi Timur Tengah komite dari Dewan Penelitian Ilmu Sosial. Dia telah Ford Foundation Fellow Wilayah Luar Negeri, dan telah memegang beasiswa dari Rockefeller Foundation, Sosial Science Research Council, National Endowment for the Humanities, Woodrow Wilson Foundation, Pusat Studi Lanjutan dalam Ilmu Perilaku, dan Institute for Advanced Study di Yerusalem. Dia telah menjabat sebagai Ketua departemen di kedua Universitas Chicago dan UCLA. Dia telah melakukan penelitian lapangan di Mesir, Iran, Lebanon, Tunisia, dan Pakistan. Profesor Binder adalah penulis Agama dan Politik di Pakistan (1961), Iran: Pembangunan Politik dalam Masyarakat yang Berubah (1962), Revolusi ideologi di Timur Tengah (1964), Dalam Momen Antusiasme: Kekuasaan Politik dan Stratum kedua di Mesir (1978), dan Liberalisme Islam (1988). Profesor Binder adalah anggota dari kedua Studi Islam dan Timur Dekat Program Studi Interdisipliner.<sup>4</sup>

Pembahasan Binder tentang Islam Liberal<sup>5</sup> dimulai dari teorinya tentang politik liberal dan hubungannya dengan agama Kristen di Barat. Alhasil, pembacaannya terhadap Islam Liberal tersebut merupakan usaha memproyeksikan apa yang terjadi dalam agama Kristen di Barat terhadap Islam. Binder menilai bahwa banyak yang menyalahartikan sikap liberal di Barat terhadap agama Kristen. Banyak yang menyangka politik liberal di Barat menafikan sama sekali agama. Pandangan ini menurut Binder keliru. Politik liberal di Barat justru tetap menghormati agama Kristen, sama seperti dihormatinya agama

---

<sup>3</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard\\_Binder](http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Binder)

<sup>4</sup> [http://www.international.ucla.edu/person.asp?Facultystaff\\_ID=216](http://www.international.ucla.edu/person.asp?Facultystaff_ID=216).

<sup>5</sup> Istilah dalam bahasa aslinya yang digunakan Binder adalah "*Islamic Liberalism*", sedikit berbeda dengan yang digunakan oleh Kurzman, yaitu "*Liberal Islam*." Walaupun agak berbeda dalam menyebut istilah, namun kelihatannya arah yang diinginkan keduanya sama.

dan kepercayaan lain, sekalipun itu kepercayaan atheis,<sup>6</sup> sehingga hubungan agama dan Negara bisa berjalan ideal saling menghormati bidang garapan masing-masing.<sup>7</sup>

Leonard Binder memfokuskan kajiannya, dalam liberalisme Islam dengan Liberalisme politik. Buku tersebut mempertimbangkan pendapat bahwa dewasa ini sekularisme mulai kurang mendapat sambutan dan cenderung tidak dipakai sebagai basis ideologi bagi liberalisme politik di Timur Tengah. Binder sebagai seorang tokoh liberal mengkritik pemikiran Al-Maududi dan Sayid Quthb. Disamping ia juga mengkritik pendapat Dhiyauddin Rais yang mengkritik buku Ali Abdul Roziq.<sup>8</sup> Binder menyebut kritikan ke Abdul Roziq sebagai kritik yang penuh kekusaran.<sup>9</sup>

Menurut Binder, untuk mencapai kondisi politik yang liberal mau tidak mau harus didahului oleh berkembangnya pemikiran liberal (*liberal thought*) di Negara bersangkutan. “*Political liberalism can exist only where and when its social and intellectual prerequisites exist*,”<sup>10</sup> demikian

<sup>6</sup> Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (Chicago: Mc Gill Universty Press, 1988), 3.

<sup>7</sup> Pandangan seperti ini memang merupakan pandangan tipikal tentang makna liberalisme yang tumbuh berkembang di Barat. Sebagai perbandingan, J. Salwyn Schapiro menjelaskan hubungan antara agama dan liberalisme sebagai berikut: *In general, liberals have been rasionalist. Asaconsequence they have developed what may be called a secular attitude toward religion. In their vien, a religion is an opinion to be tolerated like all other opinions; and a church is a private institution to be accepted like all other institutions. Liberalism has advocated freedomofnon-belief as well as of belief. Toachievecompletereligiousfreedom required the secularization of public life. Everywhere, liberals generally have advocated separation of church and state; secular, public education; civil marriage; and laws permitting divorce.* (J. Salwyn Schapiro. *Liberalism: Its Meaning and History*. [New Jersey: D. Van Nostrand Company, 1958], 12).

<sup>8</sup> Ali ‘Abdul Roziq (1866-1966) tokoh pertama yang menjadi rujukan kaum liberal.

<sup>9</sup> Binder dalam melakukan kritikan terhadap al-Maududi dan Sayid Quthb, menyajikan karya radikal ‘Ali ‘Abd. Roziq yang menekankan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Leonard Binder dalam bukunya menyatakan bahwa titik sentral karakter tantangan intelektual yang dimunculkan oleh Ali Abd. al-Raziq terhadap para Ulama tradisional al-Azhar dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukm, adalah perbedaan antara makna komunitas politik dan pemerintahan. Dalam arti, apakah Umat Islam itu bisa dimaknai sebagai komunitas politik atau komunitas religius an sich dan apakah pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian. Tesis yang dilontarkan Ali Abd. Al-Raziq yang secara tajam menyatakan bahwa Umat Islam adalah komunitas religius an sich dan risalah tidak terkait dengan pemerintahan, diposisikan sebagai pemikiran liberal Mesir modern yang terbaik, dan sebagai bahan perdebatan politik yang menarik. Leonard Binder, 221

<sup>10</sup> Binder, *Islamic Liberalism...*, 2.

ungkap Binder. Kondisi yang dimaksudnya adalah kondisi sosial yang liberal dan pemikiran yang liberal.

Untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan sebagai pemikiran liberal, ia mengkontraskannya dengan pemikiran tradisional yang juga disebutnya sebagai pemikiran fundamentalis. Menurut Binder, pemikiran tradisional adalah pemikiran yang berbasis pada kepercayaan dan opini, selain pada apa yang disebutnya sebagai pengetahuan (knowledge). Pengetahuan sendiri dirumuskannya sebagai *“the correct representation of the world, free of error and without the distortion of perspective, intentionality, or physical frailty.”*<sup>11</sup> Sementara bagi kalangan tradisionalis, diakui oleh Binder, bahwa pengetahuan bagi mereka adalah apa yang juga berbasis pada kepercayaan dan opini yang bias jadi mengabaikan rasionalitas. Sebab, rasionalitas lebih banyak diwadahi oleh pemikiran yang berdasar pada knowledge (ilmu pengetahuan) murni. Rasionalitas itu sendiri merupakan ciri utama dari pemikiran liberal. Oleh sebab itu, pemikiran tradisionalis yang berbasis kepercayaan dan opini itu berseberangan dengan pemikiran liberal. Jelas dalam hal ini, Binder mengkontraskan antara rasionalitas dan opini—yang di dalamnya juga termasuk kepercayaan.

Dalam konteks Islam, Binder pun membedakan pola pemikiran Islam menjadi tradisionalis (fundamentalis) dan liberal. Pemikiran tradisional dalam Islam didefinisikannya sebagai pemikiran yang menjadikan “bahasa” al-Quran sebagai dasar yang absolute untuk membentuk pengetahuan tentang dunia. Pengetahuan tentang berbagai hal dikonstruksi oleh teks al-Quran.<sup>12</sup> Istilah lain yang sepadan dengan istilah “tradisionalis” yang juga disebutkannya dalam buku tersebut adalah “fundamentalisme Islam” (Islamic fundamentalism). Islam fundamentalis ini secara umum terkategori sebagai tradisionalis dalam pengertian di atas, namun muncul sebagai suatu gerakan di era modern; sering juga dikategorikan sebagai gerakan Islam modernis. Islam fundamentalis ini dijelaskan Binder sebagai berikut:

*“Islamic fundamentalism, thought relatively modern movement, has its doctrinal roots in the earliest period of Muslim history. It shares many historical Islamic movements the recurring impulse to renew the faith, to return to pristine origins, to shed the accretions of time and clime, and to recapture the vigor and simplicity of prophetic times. At the core of the*

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

*ideology of this movement there is a strong component of emotional faith, but the distinctive characteristic of the most recent fundamentalist movement has been a special sort of scripturalism.”<sup>13</sup>*

Berdasarkan definisi itu dapat disimpulkan bahwa Islam liberal yang dimaksud Binder adalah mereka yang menganut paham penafsiran yang tidak tekstual terhadap al-Qur'an, melainkan penafsiran yang didasarkan pada pencarian esensi makna ayat, bukan apa yang tersurat dalam teksnya. Pencarian makna esensial, bukan tekstual itulah yang dianggap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Walaupun demikian, Binder tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana metode dan model pencarian makna “esensial” ayat itu, sekalipun sepanjang bukunya ia menunjukkan contoh-contoh pemikir dan pemikirannya yang ia sebut liberal secara luas terutama Ali Abd Al-Raziq dan Thariq al-Bishri. Selain itu, Binder juga menyinggung Zaki Naquib Mahmud dari Mesir, Tarif Khalidi dari Libanon, dan Abdallah Laroui dari Maroko. Semua yang dikutipnya adalah para pemikir liberal yang menulis secara khusus tentang hubungan Islam dan politik yang dalam pandangan Binder akan menjadi salah satu prasyarat terciptanya suatu politik liberal di negara-negara Islam, terutama Timur Tengah yang menjadi fokus analisisnya.<sup>14</sup>

Dalam konteks ini, Donald Eugene Smith (1970: 85-6) menyatakan bahwa sekularisasi politik dicirikan oleh: (a) pemisahan politik dari ideologi agama dan struktur eklesiastikal; (b) ekspansi politik (pemerintahan) untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam wilayah sosial ekonomi yang sebelumnya dijalankan oleh struktur keagamaan; (c) transvaluasi kultur politik untuk menekankan tujuan-

---

<sup>13</sup> Terjemah, “Fundamentalisme Islam, sekalipun secara relative merupakan gerakan modern, ia memiliki akar doctrinal pada periode awal sejarah Islam. Gerakan ini banyak menggunakan sejarah pergerakan Islam untuk menggerakkan hati memperbaharui keimanan, mengembalikan kemurnian (Islam), mengarahkan perkembangan zaman, dan untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kesederhanaan kehidupan zaman Nabi. Pada bagian inti ideologi gerakan ini terdapat komponen yang sangat kuat dari keyakinan yang emosional, akan tetapikarakter yang khusus dari sebagian besar fundamentalis saat ini adalah suatu sikap skripturalisme yang khas.”Lihat *ibid*, 170.

<sup>14</sup> Zuly Qodir terlalu berlebih-lebihan menyimpulkan apa yang dijelaskan Binder tentang definisi Islam liberal, sehingga membentuk opini yang tidak objektif terhadap kelompok yang disebutnya sebagai tradionalis-fundamentalis. Lihat, ZulyQadir, *Islam Liberal...*, ..., 11-12

tujuan temporal non-transenden dan cara rasional pragmatis, yakni nilai-nilai politik sekular; (d) dominasi politik atas keyakinan agama, praktik agama dan struktur eklesistikal.<sup>15</sup>

Hal ini menyiratkan bahwa sekularisasi politik dan meminggirkan agama dari politik merupakan prasyarat bagi suatu negara-bangsa untuk bisa memasuki dunia modern dan mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Hanya saja, tesis ini tidak sepenuhnya mendapatkan justifikasi otentik secara empiris, karena terdapat banyak Negara yang mencapai tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi dengan tepat setia pada tradisi keagamaan yang mereka anut. Karena itu, kita mesti sependapat bahwa perubahan politik dan sosial yang signifikan tidak akan pernah terjadi dalam masyarakat yang regim penguasanya mengklaim mendapatkan legitimasi oleh simbol-simbol keagamaan, di mana penguasanya diyakini sebagai Ilahiyah atau ekspresi ilahiyah. Karena itu, perubahan atau modernisasi politik sangat tergantung pada desakralisasi atau sekularisasi politik.

Secara kategorial, paling tidak ada tiga paradigma pemikiran politik Islam dalam melihat relasi agama dan negara.<sup>16</sup> *Pertama*, paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Islam adalah *din wa dawlah*.<sup>17</sup> Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara.

Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Menurut pendekatan integralistik, Islam diturunkan sudah dalam kelengkapan yang utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap-tiap bidang kehidupan. Pandangan ini telah mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang komprehensif.

Pada spektrum ini, beberapa kalangan Muslim terutama kalangan fundamentalisnya beranggapan bahwa Islam harus menjadi

---

<sup>15</sup>Ahmad Nur Fuad, *Sekularisasi Politik; Pengalaman Amerika Serikat Dan Dunia Islam*, Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>16</sup>Masykuri Abdillah membagi kepada kelompok konservatif, modernis, dan sekuler. Sementara Bahtiar Effendi mengelompokkannya ke dalam dua spektrum pemikiran: formal-idealistik dan substansial-realistik. *Demokrasi di Persimpangan Makna*, 57. Bandingkan dengan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 1.

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Nidham al-Hukm fii al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1963), 18. Bandingkan dengan Abdul Baqi Surur, *Dawlah al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1972), 80

dasar negara; bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial.<sup>18</sup> Singkatnya, model yang pertama ini merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek-aspek legal formal idealisme Islam. Konsekuensi dari paradigma ini adalah sistem politik modern diletakkan dalam posisi *vis a vis* dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>19</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa inti landasan teologis paradigma pertama ini adalah keyakinan akan watak holistik Islam.<sup>20</sup> Premis keagamaan ini dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara, antara yang transendental dan yang profan.

Model pandangan holistik ini dianut oleh dua kelompok Islam,<sup>21</sup> yaitu: Pertama, Islam tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi, praktik dan pemikiran politik Islam klasik, semisal Rasyid Ridla (1865-1935), *kedua*, Islam fundamentalis, yakni

---

<sup>18</sup> Menurut pemahaman mereka, negara Madinah yang dibangun oleh Nabi tidak didasarkan pada batas-batas geografis, ras, warna kulit, atau nasionalitas. Negara ini mewakili kehendak bersama dari sebuah masyarakat penganut Islam yang terorganisir dan tidak mengenal klan, suku, nasion yang disebut ummah. Ummah yang menegakkan negara ini pada hakekatnya bersifat supra nasional dan satu-satunya kekuatan pemersatu umat manusia yang berbeda-beda di dalam tradisi, adat kebiasaan, ras, dan nasionalitas adalah wahyu. Baca Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, (Bandung: Pustaka, 1995), 172.

<sup>19</sup> Dalam konteks sekarang, pemahaman ini tidaklah terlalu mengejutkan meskipun kadang-kadang mengawatirkan. Dunia Islam kontemporer menyaksikan sebagian kaum Muslimin yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya pada ajaran secara eksklusif tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang bakal muncul dalam praktiknya. Ekspresi-ekspresinya dapat ditemukan dalam istilah-istilah simbolik yang dewasa ini populer dengan berbagai istilah, seperti revivalisme Islam, kebangkitan Islam atau fundamentalisme Islam. Dalam konteks negara bangsa yang ada dewasa ini, seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Indonesia, model formal itu mempunyai perbenturan dengan sistem politik modern.

<sup>20</sup> Ada banyak ayat al-Qur'an yang dapat digunakan untuk mendukung pernyataan ini. Ayat yang paling sering dirujuk adalah al-Qur'an 16:89 yang berbunyi: "*Dan Kami turunkan kepadamu kitab suci untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi mereka yang berserah diri (kepada Allah)*".

<sup>21</sup> Masykuri Abdillah, ..., 1.



mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam dan tradisi Nabi secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia.

*Ketiga*, paradigma sekularistik yang menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Dengan perkataan lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali temali dengan urusan kenegaraan.

### **Islam Liberal Perspektif Charles Kurzman**

Charles Kurzman adalah seorang profesor sosiologi di University of North Carolina di Chapel Hill dan co-direktur Pusat Carolina untuk Studi Timur Tengah dan Peradaban Islam. Dia adalah penulis *The Martir Hilang* (2011), *Demokrasi Ditolak, 1905-1915* (2008), dan *Revolusi terpikirkan di Iran* (2004), dan editor antologi *Islam Liberal* (1998) dan *Islam Modernis, 1840-1940* (2002).

Dalam buku *Wacana Islam Liberal*, Charles Kurzman memulai pengamatannya dengan membantah istilah “Islam Liberal”. Menurut Kurzman, ungkapan “Islam liberal” (liberal Islam) mungkin terdengar seperti sebuah kontradiksi dalam peristilahan (*a contradictio in terms*).<sup>22</sup>

Islam itu sendiri, secara lughawi (menurut bahasa), bermakna “pasrah”, tunduk kepada Tuhan (Allah) dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Islam tidak bebas. Tetapi, di samping Islam tunduk kepada Allah SWT, Islam sebenarnya membebaskan manusia dan belenggu peribadahan kepada manusia atau makhluk lainnya. Bisa disimpulkan, Islam itu “bebas” dan “tidak bebas”.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai wacana Islam Liberal. Charles Kurzman dalam karya pengantar editorialnya dalam buku “*Liberal Islam : a Source Book?*” menjelaskan bahwa Islam Liberal merupakan suatu

---

<sup>22</sup>Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta, Paramadina, 2003), xi.

<sup>23</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 6-7.

penafsiran progresif terhadap (teks) Islam yang secara otentik berangkat dari khazanah tradisi awal Islam untuk berdialog agar dapat menikmati kemajuan dari modernitas, seperti: kemajuan ekonomi, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dll. Pandangan ini mempercayai bahwa Islam apabila dipahami secara otentik sejalan dengan – bahkan perintis bagi – liberal Barat.<sup>24</sup>

Kurzman mencoba memotret fenomena Islam liberal dalam perspektif yang lebih luas dari sekadar politik. Dia memperluas cakupan diskursus Islam liberal dari persoalan politik (demokrasi) sampai kepada persoalan gender, prinsip penafsiran agama, pluralisme, kebebasan berpikir, dan kemajuan umat Islam. Dalam bukunya tersebut, Kurzman tidak mencoba menggali pemikiran-pemikiran liberal dari para pemikir Muslim, melainkan menggali pemikiran-pemikiran ke-Islaman yang dicetuskan oleh para pemikir Muslim yang idenya berkesesuaian dengan pemikiran-pemikiran liberal Barat.

Untuk menjelaskan apa yang disebutnya sebagai pemikiran Islam liberal, terlebih dahulu Kurzman memetakan dua varian pemikiran Islam yang lainnya, yaitu “Islam adat” (*costumary Islam*) dan “Islam revivalis” (*revivalist Islam*). Islam adat adalah kelompok Islam yang mengombinasikan kebiasaan daerah dengan kebiasaan umum yang berlaku di dunia Islam. Dalam hal ini, doktrin-doktrin Islam yang universal dikombinasikan dengan adat-istiadat lokal setempat.<sup>25</sup> Istilah ini sebanding dengan istilah “Islam Tradisional” yang populer lebih dulu di kalangan para peneliti tentang gerakan Islam di Indonesia seperti dalam karya klasik Deliar Noer.<sup>26</sup> Sedangkan Islam revivalis ia sepadankan dengan Islamisme, Fundamentalisme, dan Wahabisme. Pemikiran ini dianggap sebagai pemikiran yang menyerang interpretasi adat yang kurang memberi perhatian terhadap inti doktrin Islam. Islam revivalis ini cenderung tekstualis, Arabisme, dan terjebak dengan masa lalu.<sup>27</sup>

Kurzman harus memberikan definisi tentang apa yang dimaksudnya sebagai “Islam liberal” dalam bukunya tersebut. Dalam

---

<sup>24</sup> Charles Kurzman. *Wacana Islam Liberal...*,xxxii-xxxiii.

<sup>25</sup> *Ibid.* xv.

<sup>26</sup> Lihat Deliar Noer, *Pembaharuan Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1993), 55.

<sup>27</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal...*, xvi.

hal ini, Kurzman menjelaskan karakter dasar Islam liberal (Liberal Islam) sebagai berikut:

“Terdapat berbagai versi liberalisme Islam, tetapi satu elemen yang umum adalah kritiknya baik terhadap tradisi Islam adat maupun Islam revivalis, yang oleh kaum liberal disebut “keterbelakangan” (backwardness) yang, dalam pandangan mereka, menghalangi dunia Islam untuk menikmati “buah” modernitas: kemajuan ekonomi, demokrasi, hak-hak hukum, dan sebagainya. Di samping itu tradisi liberal berpendapat bahwa Islam, jika dipahami secara benar, sejalan dengan—atau bahkan perintis jalan bagi—liberalisme Barat.<sup>28</sup>

Ada dua hal, bagi Kurzman, yang menjadi karakter dasar Islam Liberal, yaitu: Pertama, kritis terhadap tradisi Islam adat dan Islam Revivalis yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam. Kedua, berkeinginan meraih kemajuan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai liberalisme Barat seperti demokrasi, kemajuan ekonomi, hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan sebagainya. Poin kedua inilah yang ingin ia tunjukkan dalam buku yang dikumpulkannya dari berbagai penulis tentang tokoh-tokoh yang dianggapnya liberal di seluruh belahan dunia Islam, termasuk di Indonesia.

Secara prinsip Kurzman sendiri mengakui perbedaan antara Islam Liberal dengan Islam Modernis. Ia menyebut gerakan modernisme Islam ini hanya sebatas mengajarkan pelajaran-pelajaran khas Barat di sekolah-sekolah mereka. Ilmu-ilmu ini digunakan untuk mengejar ketertinggalan dari dunia Barat. Kaum modernis ini, betapa pun memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat, namun mereka jauh lebih protektif terhadap agama dan kebudayaan Islam. Bagi mereka, tujuan akhirnya bukan untuk menyingkirkan Islam, melainkan untuk mengaktualkannya kembali dalam konteks kekinian. Namun demikian, ia tetap memasukkan gerakan modernisme Islam yang di Indonesia diwakili oleh Muhammadiyah sebagai salah satu varian pemikiran liberal dalam Islam karena baginya gerakan modernis ini berjasa terhadap perkembangan Islam liberal yang sesungguhnya, yaitu menjadi tempat dilahirkannya pemikir-pemikir liberal pada

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, xvii.

periode berikutnya. Oleh sebab itu, Kurzman memasukkannya sebagai salah satu fase dari kemunculan pemikiran Islam liberal.<sup>29</sup>

Atas dasar itu, tidak mengherankan bila dalam bukunya Kurzman memasukkan intelektual modernis di Indonesia seperti M. Natsir; dan tokoh Ikhwanul Muslimin yang dianggap fundamentalis Yusuf Qardhawi sebagai pemikir liberal dalam versinya. Inilah yang kemudian menuai kritik dari penulis-penulis lain. Salah satunya dapat ditemukan dalam tulisan Zuly Qodir berikut:

“Pandangan Kurzman di atas telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang Islam Liberal. Namun demikian, ia masih menyisakan beberapa persoalan penting sebab kategorisasi yang dia buat terlihat masih terlampau umum. Sebagai contoh adalah kategorisasinya mengenai intelektual liberal yang dimaknai sebagai mereka yang melakukan kontekstualisasi doktrin Islam atas realitas sosial, mereka yang mengadopsi modernitas, dan mereka yang menggunakan akal untuk ijtihad. Padahal hal seperti ini juga telah dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam memahami Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kurzman juga memasukkan para intelektual kategori fundamentalis-radikal ke dalam intelektual liberal seperti Yusuf Qardhawi dan M. Natsir. Keduanya disandingkan atau disejajarkan dengan tokoh liberal semacam Nurcholis Madjid, Abdul Karim Soroush, Fazlur Rahman, Abdullahi Ahmed An-Naim, Mohammed Arkoun, dan Ashgar Ali Engineer.”<sup>30</sup>

Charles Kurzman mengatakan bahwa liberal Islam lebih tua dari pada liberalisme barat. Liberalism Islam merupakan sebuah strategi retorika yang dikalangan orang yang terlalu sering menginternalisasi citra orang-orang barat tentang inferioritas dan keterbelakangan. Dia kemudian memperkenalkan gagasannya dengan adanya Islam Liberal yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu shari’ah liberal, shari’ah yang tersembunyi dan shari’ah yang ditafsirkan.

#### 1. Shari’ah liberal (*Liberal Shari’a*)

Bentuk yang pertama ini menyatakan bahwa shari’ah itu bersifat liberal pada dirinya sendiri jika dipahami secara tepat. Sebagai contoh, Ali Bullac (Turki, Lahir 1951), salah seorang

<sup>29</sup> Kurzman, *Wacana Islam Liberal...* xxiii dan xxvii

<sup>30</sup> Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-varian Liberalisme Islam Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: LKiS, 2010),10

Islamis liberal terkemuka di Turki yang dalam artikel-artikel yang belum diterjemahkan sebelumnya berpendapat bahwa piagam Madinah, di mana Rasulullah menjamin hak-hak non muslim untuk hidup di bawah pemerintahan muslim, menghadirkan sebuah contoh bagaimana shari'ah memecahkan sebuah masalah-masalah kontemporer secara liberal. Abdurrahman I. Doi (India-Nigeria, lahir 1933) berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan konstitusi yang pertama di dunia, sedangkan orang-orang Kristen Eropa baru menemukan konstitusionalismenya satu abad kemudian. Maurice Bucaille (perancis, lahir 1920) berpendapat bahwa Al-Qur'an memberikan metode-metode penalaran ilmiah, sedangkan kalangan ilmiah sekular satu abad lebih lama memahaminya. Syafique 'Ali Khan (Pakistan, lahir 1936) dan Abdel kebir Alaoui M'maghri (maroko, lahir 1942) berpendapat bahwa Syari'ah membangun kebebasan berfikir.<sup>31</sup>

*Liberal Shari'a*, merupakan bentuk Islam liberal yang paling berpengaruh. Khurzman mengajukan tiga penjelasan, *pertama, Liberal Shari'a* menghindari tuduhan-tuduhan ketidakotentikan otentitas dengan mendasarkan posisi-posisi liberal secara kuat dalam sumber-sumber Islam ortodoks. *Kedua, Liberal Shari'a* menyatakan posisi-posisi liberal bukan sekedar pilihan-pilihan manusia, melainkan merupakan perintah Tuhan (yang membawa pada posisi yang menyimpang, yang juga membuat liberalisme Barat menderita, yang melakukan pembenaran atas liberalisme dengan merujuk pada referensi liberalism, seperti tentang hak-hak yang "diberikan Tuhan". *Ketiga, Liberal Shari'a* memberikan rasa bangga akan penemuan yang dihasilkan; berpendapat bahwa Islam liberal lebih tua dari liberalisme Barat merupakan sebuah strategi retorika yang kuat dikalangan orang-orang yang terlalu sering menginternalisasi citra-citra orang Barat tentang inferioritas dan keterbelakangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdurrahman I. Doi, *Constitutionalism In Islamic Law* (Zaria, Nigeria: centre for Islamic legal studies, Ahmadu Bello University, 1977); Maurice Bucaille, *the Bible, the Qur'an dan Science* (Indianapolis, ind; America trust publications, 1978); Shafique Ali Khan, *Freedom of Thought and Islam* (Karachi: Royal Book C.O 1989); Abdelkebir Alaoui M'daghri, *la Liberte de Presee/ Freedom of Thought/Hurriyat al-Fiker* (Maroco; Matbaat Fazalat, 1991)

<sup>32</sup> Mengenai penyimpangan. "*Scripturalist Liberalism*", lihat Binder, *Islam Liberal*, 224. mengenai elemen-elemen Liberalisme Barat yang tidak-liberal (liberal), lihat Michael J. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice* (Cambridge: Cambridge University Press,

2. Shari'ah yang diam (*Silent Shari'a*).

Bentuk argumentasi liberal Islam yang kedua berpandangan bahwa shari'ah tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai topik-topik tertentu, Muhammad Salim al-A'wa (Mesir, kontemporer, sarjana hukum) meringkaskan pendekatan ini sebagai berikut: Jika Islam tidak menyebutkan sesuatu, hal ini menunjukkan satu dari dua hal: Apakah hal ini tidak disebutkan dalam sumber-sumber tradisional manapun atau kaum muslim tidak pernah mempraktekannya sepanjang masa. Dalam kasus yang pertama, tidak menyebutkan sesuatu berarti sesuatu dibolehkan. Pengecualian terhadap peraturan ini hanya berlaku dalam ibadah. Dalam kasus kedua, merupakan hal yang ilmiah bahwa kaum muslim seharusnya tanggap terhadap perubahan setiap waktu dan tempat.<sup>33</sup>

*Silent Shari'a* bersandar pada tafsir al-Qur'an untuk membentuk pemikiran utamanya. Namun, beban pembuktiannya sedikit lebih ringan, dibandingkan dengan *Liberal Shari'a* yang hanya perlu menunjukkan perintah-perintah positif bagi kemampuan pembentukan manusia secara abstrak, ketimbang praktek-praktek liberal secara khusus. Maka, ia memindahkan seluruh wilayah tindakan manusia dari wilayah keserjanaan al-Qur'an, dimana pendidikan-pendidikan ortodok memiliki keuntungan yang berbeda, dan menempatkannya dalam wilayah perdebatan publik.

3. Shari'ah yang ditafsirkan (*Interpreted Shari'a*).

Bentuk ketiga, argumentasi Islam Liberal yang paling dekat pada perasaan atau pikiran-pikiran liberal barat, berpendapat bahwa shari'ah ditengahi oleh pemikiran manusia. Dalam pandangan ini, shari'ah merupakan hal yang berdimensi ilahiyah, sedangkan penafsiran-penafsiran manusia dapat menimbulkan konflik dan kekeliruan. Kesimpulan semacam ini sangat rentan terhadap tuduhan-tuduhan relativisme. Namun, kaum liberal seperti Muhammad As'ad (lahir 1900) mempergunakan sumber-

---

1982); Michael j. sander (ed), *Liberaliam and its Critics* (New York: New York University Press, 1984)

<sup>33</sup> Muhammad Salim al 'Awwa, *Political Pluralism From an Islamic Prospective*, dalam Azzam Tamimi(ed), *Power Sharing Islam?*(London: Liberty For Muslim Word Publications, 1993),72-73. Lihat juga Muhammad S Al 'Awa, *On The Political System of The Islamic State*, 1975.

sumber pelaksanaan shari'ah seperti hadits Rasulullah SAW: “Perbedaan-perbedaan dikalangan umatmu yang terpelajar merupakan rahmat Tuhan.”<sup>34</sup>

Basis shari'ah yang ditafsirkan ini bersifat normatif. Yusuf Qardawi misalnya membenarkan keaneka ragam pendapat itu dalam persoalan-persoalan praktis, misalnya: “Ketakutan saya yang paling buruk terhadap gerakan Islam adalah bahwa gerakan itu menentang para pemikir bebas dikalangan pengikutnya serta menutup pintu bagi pembaharuan dan ijtihad, membatasi dirinya sendiri dengan hanya satu jenis pemikiran yang tidak menerima sudut pandang yang lain. Hasil akhir bagi pergerakan tersebut adalah kehilangan pikiran-pikiran kreatifnya dan akhirnya mengalami stagnasi.”<sup>35</sup>

Dari pembagian liberalisasi shari'ah diatas, apabila dioperasionalkan dengan berbagai problem-problem atau isu-isu kemanusiaan dalam konteks kenegaraan, kemasyarakatan dan keagamaan, dan keilmuan, seperti adanya sistem teokrasi dalam Islam, demokrasi, hak-hak perempuan, hak-hak non muslim, kebebasan berfikir, serta gagasan tentang kemajuan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menentang teokrasi.

Kaum muslim liberal berkeberatan terhadap pemberlakuan syariah karena beberapa alasan. Argumen tradisional, yang dipelopori oleh Ali Abd Raziq dan diagungkan oleh Khalaf Allah, menerapkan bentuk *Silent Shari'a*: wahyu ilahi menyerahkan bentuk pemerintahan pada konstruksi pemikiran manusia. Nabi Muhammad saw merupakan pemimpin pemerintahan sekaligus juga pemimpin agama, tetapi tidak membangun prinsip-prinsip tertentu bagi pemerintahan selanjutnya. Karena al-Quran hanya lebih memberikan penekanan pada penciptaan masyarakat yang adil ketimbang ideologi Negara, bentuk Negara yang dipilih bukanlah sesuatu yang diamanatkan. Kaum muslimin seharusnya memandang al-Qur'an sebagai sebuah bangunan moral yang besar ketimbang sebuah kitab

---

<sup>34</sup>Muhammad Asad, *The Principles Of State And Government In Islam*, (Berkeley: University Of California Press, 1961),48.

<sup>35</sup>Yousef al-Qardawi, *Priorities Of The Islamic Movement In The Coming Phase*, (Cairo: Dar al Nashr For Eghyptian Universities, 1992),143-144.

hukum. Dengan demikian, Negara muslim yang baru sesungguhnya adalah Negara sekuler, dengan ketentuan bahwa istilah Negara sekuler tersebut tidak dipahami dalam sebuah pengertian yang negatif. Negara yang demikian dapat melindungi agama dari manipulasi politik oleh kekuasaan Negara.

b. Demokrasi.

Muhammad bin al-Arbi al-Alawi berpendapat tentang masalah demokrasi bahwa hak penguasa untuk merumuskan sebuah konstitusi bagi kepentingan diri mereka sendiri yang upaya perwujudannya dengan memaksa rakyat untuk memberikan suaranya merupakan kontradiksi yang menyolok dengan prinsip-prinsip Islam dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan nasional.<sup>36</sup>

Islam hanya menentukan *shura* (musyawarah) sebagai sebuah metode untuk menentukan pilihan, apapun keadaan yang harus dihadapi, *ummah* (masyarakat islam) bebas untuk memilih dan menunjuk pemimpin. Prosedur yang sebenarnya diserahkan kepada mereka untuk menentukan sendiri, dan karena itu boleh jadi berbeda dari waktu kewaktu dan dari satu tempat ketempat yang lainnya.<sup>37</sup>

c. Mengangkat hak-hak perempuan.

Posisi Islam liberal terhadap hak-hak perempuan, tidak seperti tentang demokrasi yang tidak terlalu banyak disinggung dalam penafsiran-penafsiran oleh para kaum intelektual muslim, melainkan dihadapkan pada sejumlah pernyataan Ayat Al-Qur'an dan sunnah yang kelihatannya menunjukkan kontradiksi langsung. Sebagai contoh, Ayat al-Qur'an tentang poligami bagi laki-laki, hak-hak unilateral kaum pria untuk bercerai, hak-hak kewarisan dan otoritas kesaksian hukum pria yang lebih besar. Hadits-hadits tentang jilbab, pemisahan gender, dan ketidaksesuaian kaum perempuan untuk menjadi pemimpin sebuah komunitas muslim. Para cendekiawan liberal menentang pernyataan-pernyataan dengan berbagai cara. Pertama-pertama memeriksa kembali pernyataan-pernyataan tersebut dan

---

<sup>36</sup> Henri Munson, Jr, *Religion And Power In Morocco* (New Haven Conn: Yale University Press, 1993),111.

<sup>37</sup> Al Awwa, *Political Pluralism*,70.



kedua menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan itu tidak benar-benar mengurangi hak-hak kaum perempuan sebagaimana anggapan sebelumnya.<sup>38</sup>

d. Menghargai hak-hak non muslim.

Muhammed Talbi menggunakan pendekatan teoretis terhadap topic tentang hubungan antar agama, dan mengemukakan pendapatnya menurut tiga ketiga model Islam Liberal. Talbi mengutip ajaran ajaran positif mengenai perlakuan yang baik terhadap non muslim (*model liberal shari'a*), dia berpendapat bahwa ajaran tentang toleransi memungkinkan pembentukan dialog antar komunitas, tanpa memperhatikan contoh-contoh masa lalu (*model liberal shari'a*). Dan dia menentang unsur-unsur shari'ah yang tidak toleran, khususnya mengenai hukuman mati bagi orang murtad, sebagai sesuatu yang potensial menimbulkan keraguan (*model interpreted shari'a*). Sebagaimana Muzaffar, Pundato dan yang lainnya, Talbi menerjemahkan pandangan liberalnya kedalam aksi politik bergabung dengan kaum liberal dari agama lain dalam dialog umum dan menyerukan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang bermuatan agama.

e. Menghargai Kebebasan Berfikir.

Pendekatan *liberal shari'a* tentang kebebasan berfikir menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemikir dan bahwa shari'ah mendorong kaum muslim untuk melakukan refleksi dan penyelidikan. Kata "kebebasan" ini merupakan kata yang dipilih Tuhan bagi orang-orang yang diberkahi disurga.<sup>39</sup>

Sedangkan pendekatan *silent shari'a*, berdasarkan alasan-alasan pragmatis meperlihatkan bahwa kebebasan berfikir berguna bagi kemajuan intelektual dunia muslim dan karena itu diperbolehkan berdasarkan ajaran-ajaran yang bersifat umum berkaitan wujud komunitas yang baik. Dibawah karunia kebebasan, masyarakat harus diberikan perlindungan dalam mengembangkan aktifitas penelitian berikut perenungannya. Masyarakat harus diberi kebebasan

---

<sup>38</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal, Pengantar Islam Dan Konteks Islaminya*, (Jakarta: Paramadina, 2003), : xviii.

<sup>39</sup> Paden dalam Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal*,... : iv.

untuk berfikir dan berpendapat. Masyarakat seperti inilah yang didambakan oleh demokrasi.<sup>40</sup>

f. Gagasan tentang ide pembaharuan (kemajuan).

Pada sisi ini, Charles Kurzman memandang bahwa modernitas dan perubahan sebagai perkembangan-perkembangan positif yang potensial. Sikap ini merefleksikan sebuah peralihan kebiasaan yang signifikan dari pandangan tradisional dalam Islam, yang memandang sejarah kontemporer sebagai kemunduran dan peralihan yang berkesinambungan dari masa-masa awal pewahyuan yang diagungkan. Dalam konteks ini, kemajuan atau progress hanya berarti sebuah pemulihan praktik-praktik masa lalu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman, model interpretasi shari'ah dalam konteks ini memaksakan penyeragaman penafsiran secara absolut adalah tidak mungkin dan diperlukan. Perbedaan pendapat keberadaannya sangatlah berarti, harus diberi nilai positif yang tinggi. Rahman mengkritik pemikiran Islam tradisional yang lebih terikat pada penafsiran masalah ketimbang menghadapi tantangan perubahan.<sup>41</sup>

### Catatan Akhir

Pemikiran Islam liberal berakar dari pengaruh pandangan hidup Barat dan hasil perpaduan antara paham modernisme yang menafsirkan Islam sesuai dengan modernitas; dan paham post-modernisme yang anti kemapanan.

Upaya merombak segala yang sudah mapan kerap dilakukan, seperti dekonstruksi atas definisi Islam sehingga orang non-Islam pun bisa dikatakan Muslim, dekonstruksi al-Qur'an sebagai kitab suci, dan sebagainya. Islam liberal sering memanfaatkan modal murah dari radikalisme yang terjadi di sebagian kecil kaum Muslimin, dan tidak segan-segan mengambil hasil kajian orientalis, metodologi kajian agama lain, ajaran HAM versi humanisme Barat, falsafah sekularisme, dan paham lain yang berlawanan dengan Islam.

---

<sup>40</sup> Ghulam Ahmad Perwez, *Two Contrasting System*, terjemahan dalam Aziz Ahmad dan G.E Von Grune Baum (eds). *Muslim Self Statement In India And Pakistan*, 1857, 1968(Weisbaden, Jerman: Otto Harras Showitz, 1970),171.

<sup>41</sup> Rahman, artikel,31 dalam Kurzman,ix.

Leonard Binder mengemukakan pandangannya tentang Islam Liberal, tidak memfokuskan pada masalah-masalah Islam secara khusus, tetapi lebih menitik beratkan pada masalah politik, dengan mengajukan pikiran yang menolak rekonstruksi Negara Islam. Menurutnya, Islam tidak secara khusus menunjuk perlunya Negara Islam (Khilafah), karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal ini.

Selanjutnya Binder membagi Islam Liberal menjadi dua jenis: Pertama, Islam Liberal, yang berpandangan bahwa ide Negara Islam Liberal dimungkinkan dan diperlukan karena Islam memiliki semangat yang demokratis dan liberal, dan terutama karena, di bidang politik, Islam tidak banyak memiliki ketentuan khusus. *Kedua*, Liberalisme Islam, yang membenarkan dibentuknya institusi-institusi liberal (parlemen, pemilu, dan hak-hak sipil) dan beberapa kebijakan kesejahteraan sosial, bukan berdasarkan tiadanya undang-undang Islam yang kontradiktif, melainkan berdasarkan ketentuan Islam yang sangat khusus, yang umumnya mereka kutip dari sumber-sumber keagamaan dan dari sejarah kekhilafahan awal.

Charles Kurzman memperkenalkan gagasannya dengan adanya syari'ah liberal yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu shariah liberal (*liberal shari'ah*), shariah yang tersembunyi (*silent shari'ah*) dan shariah yang ditafsirkan (*interpreted shari'ah*). yang beroperasi pada isu-isu sistem teokrasi dalam Islam, demokrasi, hak-hak perempuan, hak-hak non muslim, kebebasan berfikir, serta gagasan tentang kemajuan.

## Daftar Rujukan

- Al 'awwa, Muhammad salim. "Political pluralism Froman islamic prospective", dalam Azzam Tamimi(ed), *Power Sharing Islam?*, London: liberty For Muslim World Publications, 1993.
- Al-Qardawi, Yousef. *Priorities Of The Islamic Movement In The Coming Phase*, (Cairo: Dar al Nashr For Eghyptian Universities, 1992.
- Asad, Muhammad. *The Principles Of State And Government In Islam*, Berkeley: University Of California Press, 1961.
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago: Mc Gill Universty Press, 1988.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, Bandung: Pustaka, 1995.

- Kurzman, Charles. *Modernist Islam 1840-1940: A Source Book*. New York: Oxford University Press
- \_\_\_\_\_, dkk (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina: 2003.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Menembus Batas Tradisi menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Noer, Deliar. *Pembaharuan Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal: Varian-varian Liberalisme Islam Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Sandel, Michael J. *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- \_\_\_\_\_, (ed), *Liberalism and its Critics*, New York: New York University Press, 1984.